

CREATIVE UNDERSTANDING DALAM PROGRESSIVISME PEMIKIRAN ISLAM POLITIK SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA (1911-1989): SEBUAH PENDEKATAN KOMUNIKASI

HASAN MUSTAPA, M. ANWAR SYI'ARUDDIN

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, STAI Darul Arqam Garut

kangmoez@uinsgd.ac.id, anwar_alghifari@ymail.com

Abstrak

Peran intelektual tokoh Masyumi cenderung terpinggirkan karena kelemahan posisi politik baik di masa rezim Orde Lama maupun Orde Baru. Kendati gagasan mereka sangat relevan dengan pengentasan problem umat. Beberapa di antaranya seperti Syafruddin Prawiranegara, merespons sikap politik penguasa dengan komunikasi politik yang santunan progresif. Proses komunikasi politik intelektual Masyumi tersebut diurai melalui beberapa aspek seperti: creative understanding, identity values, aesthetic appeal, community agreement serta reform of society. Menghadapi strategi politik propaganda Soekarno dan Soeharto terhadap sikap politik yang berbeda, Syafrudin Prawiranegara merespons dinamika politik baik Orde Lama maupun Orde Baru lebih bersifat retorik di mana ia bertumpu pada argumentasi yang mengandalkan kekuatan logika serta pendekatan persuasi dan apresiasi yang berimbang dalam melihat peristiwa, tokoh, maupun pergulatan politik yang terjadi.

Kata Kunci: *Intelektual Progressif, Syafruddin Prawiranegara, Komunikasi Politik*

A. PENDAHULUAN

Proses komunikasi seorang tokoh dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ideologi, kondisi sosial politik serta ruang ekspresi yang tersedia. Secara ideologis, setidaknya terdapat beberapa alur pemikiran politik yang menjadi arus utama di zaman pergerakan, kemerdekaan hingga pembangunan, yakni nasionalis, religious serta sosialis. Di mana yang ketiga sebenarnya cenderung mewarnai kedua pola sebelumnya.

Di zaman pergerakan, terdapat sikap politik yang berbeda terkait bentuk negara yang akan didirikan apakah integralistik atau demokrasi liberal yang memiliki irisan dengan federalism. Struktur negara yang akan dibangun perlu memiliki mekanisme kepartaian pada sisi operasional politiknya. Soekarno misalnya, penganut sistem partai tunggal yang diharapkan bisa menjadi pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Karena fungsi partai sebagai pemersatu, maka system multipartai dapat memecah belah bangsa. Idenya sempat terealisasi saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengumumkan berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai negara sekaligus pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi sebagai parlemen pada 27 Agustus 1945. Namun, demi menghindari persaingan dualitas kepentingan PNI dengan KNIP, pada tanggal 1 September 1945, Partai Nasional yang monolitik itu dibubarkan.¹ Tokoh pergerakan lainnya seperti Sjahrir memiliki gagasan berbeda. Indonesia perlu menjadi sebuah negara dengan infrastruktur demokrasi guna menopang aspirasi suara rakyat. Ide *staatspartij* (partai negara) sedianya bisa dimanifestasikan dengan beraneka komposisi sebagai representasi beragam ideology dan aliran. Akan tetapi, system ini potensial bagi terjadinya penyelewengan penguasa dengan merepresi perbedaan politik.²

Masyumi serta sebagian besar organisasi politik di Indonesia pascakemerdekaan pada 7 November 1945, dibidani oleh tiga ideology

¹ George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1952), 186.

² Ivan Aulia Ahsan, 'Maklumat 3 November & Perbedaan Sukarno-Sjahrir Soal Partai Politik', *November 03*, 2019 <<https://tirto.id/maklumat-3-november-perbedaan-sukarno-sjahrir-soal-partai-politik-cy7X>> [accessed 27 June 2020].



mainstream saat itu seperti Islam, nasionalisme, dan sosialisme.³ Ketika ibu kota Republik pindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada 3 Januari 1946, Syafrudin, Sekretaris Badan Pekerja KNIP adalah salah satu tokoh yang bergabung dengan sebuah elemen basis pendukung bagi kebijakan politik Sjahrir.⁴ Karena garis perjuangan yang searah dengan gagasan Sjahrir yang cenderung liberal dan progresif, ide dan peran politik Syafruddin Prawiranegara cenderung terpinggirkan terutama di era Orde Lama. Strategi politik rezim Orde Lama yang kemudian diteruskan Orde Baru cenderung mengedepankan propaganda daripada retorik.

Dengan propaganda, para eks-Masyumi diidentikkan sebagai kontra revolusi serta mengancam nasionalisme Pancasila. Strategi komunikasi politik Syafruddin Prawiranegara dalam merespons dinamika politik baik Orde Lama maupun Orde Baru lebih bersifat retorik di mana ia bertumpu pada argumentasi yang mengandalkan kekuatan logika serta pendekatan persuasi dan apresiasi yang berimbang dalam melihat peristiwa, tokoh, maupun pergulatan politik yang terjadi.

Di antara studi tentang tokoh politik Masyumi dengan pendekatan komunikasi ialah penelitian Tabroni (2017).⁵ Melalui penelaahan proses komunikasi “Mosi Integral” Natsir, ia menjelaskan bahwa gagasan tersebut murni diarsiteki sang eks Perdana Menteri tersebut setelah ia meneliti secara mendalam keinginan masyarakat yang ada di daerah-daerah yang tidak nyaman dengan system federalism dan ingin kembali ke bentuk

³ Rémi Madinier, *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi Dan Islam Integral*, 1st edn (Jakarta: Penerbit Mizan, 2013), 89.

⁴ B. R. O’G Anderson, *Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation: 1944-1945* (New York: Interim Report Series, Cornell University Press, 1961), 310.

⁵ Roni Tobroni, ‘Komunikasi Politik Mohammad Natsir’, *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1.1 (2017), 39–60 <<https://doi.org/10.15575/cjik.v1i1.1208>>.



negara kesatuan. Ia lalu melobi anggota parlemen yang ada di berbagai fraksi, kepara kalangan eksekutif serta para stake holder untuk seraya mensosialisasikan idenya. dengan demikian, saat ia sampaikan konsep “mosi integral” di parlemen, audiens pun dapat dengan mudah menerimanya.

Atas dasar itu, makalah ini berupaya mengetahui bagaimana komunikasi politik Islam Sjafruddin Prawiranegara. Dimensi lain dari sosok yang dikenal sebagai salah satu perintis ekonomi Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan analisis komunikasi interpretif Miller.⁶ Beberapa sumber data berupa pemikiran Sjafruddin yang dikompilasi dalam Kumpulan Karangan Terpilih 1,⁷ 2,⁸ dan 3⁹ selanjutnya dianalisis melalui aspek-aspek seperti: *creative understanding, identity values, aesthetic appeal, community agreement serta reform of society*.

C. PEMBAHASAN

Pendekatan Komunikasi dalam Politik

Komunikasi esensial bagi manusia sehingga kekurangannya dapat menghambat perkembangan kepribadian. Sejumlah ilmuwan psikologi

⁶ Katherine Miller, *Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts*, 2nd edn (New York: McGraw-Hill, 2005), hlm. 56.

⁷ Sjafruddin Prawiranegara, *Islam Sebagai Pedoman Hidup. Kumpulan Karangan Terpilih. Jilid 1*, ed. by Ajip Rosidi (Jakarta: Idayu Press, 1986).

⁸ Sjafruddin Prawiranegara, *Ekonomi Dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam. Kumpulan Karangan Terpilih. Jilid 2*, ed. by Ajip Rosidi (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011).

⁹ Sjafruddin Prawiranegara, *Agama Dan Bangsa. Kumpulan Karangan Terpilih. Jilid 3*, ed. by Ajip Rosidi, 2011.



tertarik pada komunikasi karena erat hubungannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia.¹⁰ Pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik, serta tindakan penting untuk memudahkan pihak lain memahami gagasan seseorang agar dapat terjalin efektivitas dalam komunikasi.¹¹

Secara umum, komunikasi merupakan sebuah proses di mana seorang individu mentransmisikan rangsangan untuk memodifikasi perilaku individu lain. (*the process by which an individual [the communicator] transmits stimuli [usually verbal] to modify the behavior of other individuals [the audience]*).¹² Demikian juga dalam konteks memahami politik, komunikator politik menjadi sosok sentral. Ada empat komponen yang diperlukan seorang komunikator politik handal, yakni *communicator credibility*, *communicator attractiveness*, *communicator similarity* dan *communicator power*.¹³

Beberapa disiplin ilmu seperti psikologi social, komunikasi massa dan ilmu politik turut berkontribusi pada konstruksi komunikasi politik.¹⁴ Dari ketertarikan psikologi social terhadap sikap-sikap individu yang dioperasionalisasikan dalam pengukuran dan eksperimen, menjadikan survey dan eksperimen sebagai dua instrument pengumpulan data paling umum komunikasi politik hingga saat ini. Pendekatan kompetisi atau

¹⁰ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, ed. by Tjun Surjaman, 9th edn (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 2.

¹¹ Stewart L. Tubbs and Sylvia Moss, *Human Communication: An Interpersonal Perspective* (New York: Random House, 1974), 9-13.

¹² C. I. Hovland, I. L. Janis, and H. H. Kelley, *Communication and Persuasion* (New Heaven, Conn: Yale University Press, 1953), 12.

¹³ Richard E. Petty and J. T. Cacioppo, *Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches* (Dubuque, IA: Wm. C. Brown, 1981).

¹⁴ D. M. Ryfe, 'History and Political Communication: An Introduction', *Political Communication*, 18.4 (2001), 407-20.

persaingan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam ranah ilmu politik memunculkan sebuah parameter penting bagi riset komunikasi politik seperti dapat terbaca dari proposisi bahwa komunikasi dalam kampanye pemilihan umum merupakan kasus-kasus paradigmatis dari lapangan ilmu komunikasi politik. Ada pun sejumlah riset komunikasi massa mewariskan kata-kata “dampak” dan “pengaruh” pada komunikasi politik. Akar pada bahasa “pengaruh” ini terdapat dalam sejumlah teori komunikasi politik seperti "Two-Step Flow" sampai ke "Agenda-Setting", lalu "Framing" dan "Priming".¹⁵ Secara skematik terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.

Kontribusi Disiplin Ilmu lain terhadap Komunikasi Politik

Disiplin Ilmu	Pengaruh
Psikologi Sosial	Ketertarikan psikologi social terhadap sikap-sikap individu yang dioperasionalisasikan dalam pengukuran dan eksperimen, maka survey dan eksperimen menjadi dua instrument pengumpulan data paling umum komunikasi politik hingga saat ini
Komunikasi massa	Pendekatan kompetisi atau persaingan antara kelompok-kelompok kepentingan memunculkan sebuah parameter penting bagi riset komunikasi politik
Ilmu Politik	Sejumlah riset komunikasi massa mewariskan kata-kata “dampak” dan “pengaruh” pada komunikasi politik

Sumber: Gazali (2004: 55-56).

¹⁵ Effendi Gazali, 'Interaksi Politik Dan Media : Dari Komunikasi Politik Ke Politik Komunikasi', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8 (2004), 53–74: 55-56.



Terjadi perkembangan signifikan dalam kajian komunikasi politik dari tradisional yang sederhana ala Laswell¹⁶ hingga focus kontemporer dengan pendekatan *Who gets to say what to whom?* (siapa yang memperoleh hak untuk berkata apa pada siapa) Chaffee.¹⁷ Laswell menjelaskan bagaimana sebuah tindak komunikasi bisa dianalisa dengan pertanyaan: *siapa-mengatakan apa-di saluran mana-kepada siapa-dengak efek seperti apa*. Selain itu, ia juga mengurai bagaimana efek dan pengaruh komunikasi massa.

Peneliti komunikasi mengkaji komunikasi politik dari segi efektifitasnya sementara ilmuwan politik cenderung melihat proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan otoritatif atau system politiknya. Karenanya, secara sederhana, komunikasi politik, seperti dinyatakan Almond (1966) merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam dalam setiap sistem politik.¹⁸ Spektrum kajian studi komunikasi politik yang bersifat fleksibel meliputi *opinion, attitudes, beliefs, politics as a process* dan *media effect*. Dalam bahasa Schudson (1991), komunikasi politik merupakan, “*any transmission of message that has, or is intended to have, an effect on the distribution or use of power in society or on attitude toward the use of power*”.¹⁹ Ia melihat dua gejala yakni: (a) Pesan yang disampaikan suprastruktur politik (sejumlah institusi negara formal) menyampaikan pesan-pesan politik kepada public, (b) Respons dan

¹⁶ Harold D. Laswell, *Politics: Who Gets What, When How?* (New York: Whittlesey House, 1936).

¹⁷ *Political Communication: Issues and Strategies for Research*, ed. by S Chaffee (Beverly Hills: SAGE, 1975).

¹⁸ Gabriel Almond and Bingham Powell, *Comparative Politics a Developmental Approach* (Boston: Little Brown, 1966).

¹⁹ Michael Schudson, ‘The Sociology of News Production Revisited’, in *Mass Media and Society*, ed. by James Curran and Michael Gurevitch (London: Edward Arnold, 1991).

artikulasi pesan politik oleh infrastruktur politik terhadap suprastruktur. Secara empiris, system komunikasi politik tidak selalu merepresentasikan system politik itu sendiri.

Dalam proses sosialisasi pesan termasuk di wilayah politik, terdapat tiga proses yakni kognisi (*cognitions*), keinginan (*wants*) dan sikap (*attitudes*). Kesamaan persepsi terkait ketiga unsur ini dapat memperlebar peluang keberhasilan sebuah proses komunikasi.²⁰ Proses komunikasi dalam politik juga berkenaan dengan kekuasaan. Para penguasa biasanya dapat membentuk opini untuk memberi justifikasi kebenaran bagi kebijakan politik yang diambilnya. Ini karena kekuasaan bersifat dinamis baik termanifestasi secara positif maupun negative. Ia lahir dari gagasan sebuah *discourse* yang memengaruhi institusi dan praktik social. Eksistensinya seakan tidak disadari karena sifatnya yang abstrak di mana individu terkuasai olehnya.²¹

Komunikasi politik dalam perspektif Islam lebih bersifat etis. Di antaranya mengandung nilai: (a) Urgensi kesadaran umat untuk meneruskan kepemimpinan Nabi (*prophetic leadership*) dalam hal kenegaraan untuk menjaga kelestarian agama Islam; (b) Keterjagaan jarak kepentingan antara ulama dengan actor politik dan pejabat.²² Misalnya, seorang ulama tidak boleh merendahkan ilmu, seperti sering pergi ke tempat “orang yang tidak berhak”, dalam salah satu konteks ialah para

²⁰ David Krech, *Individual in Society* (California: McGraw Hill, 1962).

²¹ Michael Foucault, *Power Knowledge: Selected Interviews and Others Writings 1972-1977* (New York: Pantheon Books, 1980), 118.

²² Ibn Jama'ah Al-Kinaniy, *Tazkirah Al-Sāmi' Wa Al-Mutakallim Fi Adab Al-'Ālim Wa Al-Muta'Alim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).



penguasa; (c) Pengaruh budaya patron-client dalam system social masyarakat Islam.²³

Pada tataran implementasi, komunikasi politik perspektif Islam termanifestasi dalam dua spectrum, structural dan kultural. Secara structural, pola komunikasi dalam politik Islam terfragmentasi dalam dua bagian yakni, penggunaan kekuasaan untuk menegakkan ajaran Islam atau sebaliknya, memanipulasi ajaran Islam untuk menegakkan kekuasaan. Pada sisi pertama ialah paradigm khulafa` al-Rasyidun. Sementara kerajaan Mu'awiyah yang bersifat dinasti dan membelakangi system syura ala khulafaur rasyidun adalah tipe kedua.²⁴ Secara kultural, komunikasi politik yang dilakukan para ulama terutama yang tradisional lebih primordial. Selain berbasis Al-Quran dan Hadits Nabi SAW, semua tindakan komunikasi mengambil preferensi politik pada kitab-kitab kuning.²⁵

Di Era Soekarno, komunikasi politik didominasi retorika pidato Soekarno yang menghipnotis dan menggoyang emosi massa. Di tahun 1957 terdapat 125 tindakan penindasan terhadap pers meliputi sejumlah interogasi dan peringatan terhadap wartawan serta penahanan dan penutupan beraneka koran. Saat itu kebanyakan media cenderung partisan dan lebih merupakan penyambung lidah berbagai partai politik. Koran Indonesia Raya, satu di antara yang netral dan tidak partisan, secara khusus seringkali mengupas korupsi dan beragam kesalahan pemerintahan

²³ A. Sahab, 'Politik Patron Client Di Sampang', *Jurnal Jejaring Administrasi Public*, II.8 (2012), 1–7.

²⁴ Ibnu Qutaybah, 'Al-Ma'arif', in *Dzakha'ir Al-'Arab*, ed. by Tsarwat 'Ukasyah (Dar al-al-Ma'arif, 1961).

²⁵ Ihwan Huda Al Mujib, 'Perspektif Islam Dalam Komunikasi Politik Kyai (Studi Etnografi Pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah Jember Jawa Timur)', *Jurnal Nomosleca*, 6.1 (April) (2020).

di bawah perdana menteri dari aliansi politik mana saja. Koran ini dilarang terbit tahun 1958. Pada tahun 1960, dengan kekuatan otoriter, Soekarno memaksa seluruh pengelola koran dan majalah untuk menandatangani 79 poin dukungan-yang isinya mirip sumpah kesetiaan-terhadap sejumlah program pemerintah,²⁶ terutama orientasi politik ekonomi demokrasi terpimpin.²⁷

Senada dengan Soekarno, pada rezim Soeharto penerus tahta kekuasaan setelahnya sejak 196-1998, melakukan kontrol ketat terhadap kebebasan pers melalui Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dengan kriteria preferensinya politis. Tak berhenti di sini, rezim yang berkuasa hampir 32 tahun ini juga membreidel 13 koran dan majalah tahun 1974, menutup 7 koran Jakarta dan 7 koran kampus pada 1978, serta sejumlah koran, jurnal dan majalah pada periode 1981-1994.²⁸ Di era Orde Baru, komunikasi politik dilakukan searah dengan tipe atas ke bawah (*top-down*). Presiden memberikan arahan dan petunjuk yang kemudian langsung disetujui oleh DPR yang mayoritas dihuni fraksi Golkar, lalu para menteri dan Gubernur. Demikian seterusnya hingga DPD tk. I dan para Bupati, DPRK Tk. II, camat hingga tingkat desa.

Krisis ekonomi yang membawa kejatuhan rezim Soeharto memunculkan euforia Masa Reformasi 1998 yang dicirikan dengan geliatnya kemerdekaan berpendapat dan demokrasi. Para pahlawan kesiangian yang dulunya seide dengan Soeharto, balik membelakangi Sang Bapak Pembangunan. Sebagai aktor politik, mereka mengolah citra,

²⁶ E. C. Smith, *Pembredelan Pers Di Indonesia* (Jakarta: Grafiti Press, 1983).

²⁷ A. Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Pers Di Indonesia* (Jakarta: Information Development Research Project Information Department, 1980).

²⁸ Gazali, 61.



melakukan persuasi serta retorika politik demi memperoleh simpati rakyat. Pengolahan citra, persuasi dan retorika politik. Pola komunikasi langsung berubah arah: dari bawah keatas (*bottom-up*) di era ini. Sayangnya, dalam perkembangannya, pola komunikasi bottom-up bahkan lebih tidak efektif ketimbang pola top-downnya Soeharto. Frustrasi karena impotennya aspirasi beralih menjadi anarki berkelanjutan hingga pergantian presiden RI 4 kali terjadi dalam tempo singkat. Nyatanya, kedua pola baik atas-bawah maupun bawah-atas bersifat monolog (searah) dan tidak bersifat komunikasi dua arah (dialog).²⁹

Dalam komunikasi juga dikenal propaganda dan retorika. Propaganda merupakan penyampaian komunikasi oleh komunikator dengan pernyataan agar komunikan bertindak sesuai keinginan sang pemberi pesan. Faktor kepentingan menjadi tujuan sehingga apakah isi pernyataan berupa fakta atau non fakta, kebenaran atau kebohongan, tidak menjadi soal. Asal tercipta keyakinan pada receiver pesan untuk menganut suatu keyakinan, sikap, hingga orientasi tindakan tertentu. Secara luas, Severin (1988) mengemukakan bahwa propaganda merupakan teknik memengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi penyajian baik termanifestasikan secara vocal, literal, visual atau instrumental.³⁰

Dalam retorika, terdapat lima hukum yang dikenal *The five canons of rhetoric*. di antaranya *inventio* (penemuan), *dispositio* (penyusunan), *elocutio* (gaya), *memoria* (memori), *pronuntiatio* (penyampaian). Pada tahap penemuan, pembicara menelusuri bahan, meneliti khalayak untuk

²⁹ Kamaruddin, *Modul Komunikasi Politik* (Lhokseumawe: Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh, 2015), 2.

³⁰ Warner J. Severin and James W. Tankard, *Communication Theories: Origins, Methods, Uses* (White Plains, N.Y.: Longman, 1988).

memberikan metode persuasi yang tepat. Di tahap penyusunan, pembicara menyusun naskah (pidato) atau mengorganisasi pesan. Selanjutnya, dilakukan pemilihan diksi yang tepat untuk mengemas pesan. Lalu, mengingat apa yang ingin disampaikan dengan mengatur sejumlah bahan pembicaraan. Tahap terakhir ialah penyampaian pesan secara lisan.³¹

Syafruddin, Sosok Intelektual Progressif

Pada dasawarsa 1930-an, Kapitalisme, Sosialisme dan Komunisme menghadapi musuh yang sama, yakni, Fasisme yang direpresentasikan oleh Jerman, Italia dan Jepang. Pertentangan ini meruncing hingga lahir Perang Dunia II. Meski Syafruddin dan Sjahrir sama-sama anti-Fasisme serta menjunjung tinggi humanisme. Namun, keduanya berbeda orientasi. Sjahrir, muslim sekuler yang apresiatif terhadap Sosialisme Demokrasi mendirikan Partai Rakyat Sosialis (Paras) yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Sosialis Indonesia (PSI) sementara Syafruddin, simpatisan Sosialisme Religius, berlabuh pada Masjumi.³²

Syafruddin, memiliki latar belakang pendidikan Eropa melalui ELS (*Europesche Lagere School*) di Serang, Banten dan tamat di Ngawi, Madiun tahun 1925; MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), selesai tahun 1928 serta AMS (*Algemene Middelbare School*) bagian A di Bandung yang diselesaikan tahun 1931. Minat ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Sastra tidak kesampaian karena saat itu di Indonesia belum ada dan harus ke Belanda. Ia lalu masuk Sekolah Tinggi

³¹ Jalaluddin Rakhmat, *Retorika Modern Pendekatan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 6-8.

³² M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Neo-Klasik Dan Sosialisme Religius. Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Syafruddin Prawiranegara* (Jakarta: Mizan Publika, 2011), 90.



Hukum (RHS, *Rechts Hogeschool*) di Batavia dan meraih gelar *Meester in de Rechten* (Mr.) tahun 1939³³. Meski latar belakang pendidikan ilmu hukum, karir pertamanya justru di bidang keuangan. Dari sini ia meretas jalan hingga masuk ke panggung politik melalui KNIP, atas bantuan Sjahrir.

Peran historis yang dialami menjadikan sosoknya dipandang dalam dua sisi. Dalam perannya sebagai Ketua PDRI, ia dipandang sebagai seorang pahlawan. Keikutsertaannya dalam PRRI membuat tinta sejarah menguji dan mempertanyakan pengakuan kepahlawanan tersebut. Terlepas dari berbagai dinamika peran yang dijalannya, pemikiran Sjafruddin sedianya terkait dengan beberapa tema penting seperti pluralisme, inklusivitas, keadilan sosial, dan kesetaraan.

Tema-tema tersebut, merupakan sejumlah persoalan yang diangkat oleh para pemikir Muslim yang dikenal progresif. Istilah ‘progresif’ merujuk pada perjuangan tanpa henti akan gagasan universal tentang keadilan di mana tidak tercipta kemakmuran, kemanusiaan, dan martabat pada suatu masyarakat tunggal dengan mengorbankan pihak lain. Menurut paham ini, menjadi Muslim itu hendaknya melibatkan penegasan nilai kemanusiaan atas semua umat, dilandasi keyakinan aktif bahwa semua manusia bertanggung jawab atas distribusi sumber daya alam yang adil dan merata sebagai anugerah Ilahi, lalu berusaha hidup harmonis bersama alam³⁴. Untuk mengatasi berbagai problematika masyarakat Muslim kontemporer, diperlukan reformulasi berbagai elemen tradisi Islam sehingga terbukanya jalur penelitian yang lebih aktual.

³³ J. Riberu, ‘Manusia Etis Sjafruddin Prawiranegara’, in *Mr. Sjafruddin Prawiranegara Pemimpin Bangsa Dalam Pusaran Sejarah*, 1st edn (Jakarta: Republika, 2011), 4.

³⁴ Omar Safi, ‘What Is Progressive Islam’, *ISIM Newsletter*, 13.December (2003), 48–49: 48.



Beberapa tokoh yang masuk dalam usaha ini di antaranya: Abdulkarim Soroush, Nurcholish Madjid, Abdullahi an-Na'im, Amina Wadud, Khaled Abu al-Fadl, Farish Ahmad-Noor dan Farid Esack. Mereka telah memberikan pemikiran yang krusial bahkan dalam beberapa kasus berkontribusi secara revolusioner terhadap pemikiran muslim kontemporer³⁵. Arus pergerakan intelektual Muslim ini terkadang dicitrakan 'reformasi Islam', 'Islam progresif', 'modern Islam', dan 'Islam liberal'. Label 'progresif' sendiri merujuk kepada sejumlah aktivis dan ilmuwan dari berbagai penjuru dunia Muslim yang tergabung dalam *Jaringan Muslim Progresif (Progressive Muslim Network-PMN)* akhir tahun 1998 di internet.³⁶

Komunikasi dalam Islam Politik Syafruddin

Hasil kajian ini memperlihatkan pemahaman Syafruddin Prawiranegara melalui pendekatan interpretif ialah sebagai berikut.

Creative Understanding of People

Melalui pemahamannya terhadap tipikalisasi manusia, dapat dipahami bagaimana perspektif dan konstruk pemikiran Syafruddin. Proses ini merupakan sebuah upaya kreatif untuk memahami manusia (*creative understanding of people*). Pada Syafruddin, proses ini berjalan dua tahap. Pertama, membuat indikator kriteria sikap, misalnya apa itu demokratik, patriot, islami, dsb. Kedua, melakukan refleksi historis secara empiris terhadap beberapa tokoh. Dalam hal ini, etika dan moralitas harus berkaitan dengan politik sebagaimana aplikasi tindakan moralis dan etis

³⁵ Jarmila Drozdikova, 'Review Articles "Progressive Muslims"', *Asian and African Studies*, 14.1 (2005), 83–95: 83.

³⁶ Safi (2003); Drozdikova (2005).



harus tercermin dalam kehidupan politik³⁷. Dalam konteks ini, rumusan Sjafruddin terkait dengan bagaimana para tokoh nasional mengartikulasikan nilai-nilai etis dalam perannya sebagai politisi dan negarawan, terlihat sebagai berikut.

Demokratik Sejati. Dalam pandangan Sjafruddin, seorang demokrat itu hendaknya memiliki kriteria: (a) kesederhanaan; (b) berkata dan bersikap sesuai keyakinan; (c) berani menyatakan pendapat apabila bermanfa'at bagi masyarakat; (d) siap memegang amanat kekuasaan dalam rangka berbakti kepada masyarakat; (e) tidak mau dipaksa dan memaksakan diri untuk berkuasa apabila dirasakan tidak akan bermanfa'at bagi masyarakat³⁸. Beberapa tokoh yang masuk dalam kriteria ini di antaranya Bung Hatta dan Sjahrir.

Pada tahun 1945, sekitar bulan September atau Oktober, Sjafruddin pernah berbeda pendapat tentang perlunya Pemerintah Republik Indonesia yang baru lahir untuk mengeluarkan uang Republik Indonesia sendiri. Hatta awalnya menolak dengan sifat *gründlichkeit* (ketelitian)-nya, khawatir kondisi itu akan dianggap dunia internasional sebagai pemalsu uang (*valsemunters*). Namun, setelah diyakinkan dengan argumen yang kuat, ia akhirnya dapat menerima gagasan Sjafruddin dan rekan-rekan perihal ide mengeluarkan uang Republik Indonesia sendiri sebagai pengganti uang Jepang yang pada saat itu masih berlaku. Siap menerima

³⁷ Bahtiar Effendy, 'Pentingnya Mengaitkan Etika Dan Moralitas Dengan Politik', in *Jalan Tengah Politik Islam. Kaitan Islam, Demokrasi, Dan Negara Yang Tidak Mudah* (Jakarta: Ushul Press, 2005), 328-330.

³⁸ Sjafruddin Prawiranegara, 'Bung Sjahrir Pendekar Kemerdekaan Dan Pendekar Demokrasi', in *Mengenang Sjahrir*, ed. by H. Rosihan Anwar (Jakarta: Gramedia, 1980).

pendapat lain serta mengundurkan diri saat berseberangan prinsip dengan Soekarno memperlihatkan watak demokrat sejati seorang Hatta.³⁹

Sjafruddin kerap melontarkan kritik kepada sejumlah nasionalis seperti Soekarno yang pada era revolusi kemerdekaan menolak kerjasama dengan Belanda tapi begitu jinak berkompromi dengan pihak Jepang. Padahal kekejaman Jepang jauh di atas Belanda. Anehnya, pak Sjaf membela sikap kooperatif Hatta terhadap Jepang dengan mengatakannya masih proporsional dan *waardig*. Karena menurut Sjafruddin, meski bekerja sama dengan Jepang tapi Hatta tetap kritis dalam setiap pidato dan sikapnya serta berupaya meyakinkan bahwa sikapnya tersebut merupakan *contre cœur* di mana di belakang bantuan tersebut ada upaya untuk meringankan rakyat sebisa mungkin.⁴⁰

Selain Hatta, kriteria demokrat sejati layak disematkan kepada Sjahrir. Sjafruddin menyebut tokoh sosialis ini sebagai sosok yang mampu menyampaikan gagasan dengan sederhana, jelas, jujur dan meyakinkan hingga mudah dipahami.

Patriotitik. Bagi Sjafruddin, sikap patriot memiliki beberapa dimensi seperti : (a) Kesetiakawanan yang besar terhadap kawan-kawan seperjuangan, (b) Lebih mengutamakan rasa kemanusiaan dan kerakyatan di atas status dan strata sosial. Dalam kriteria ini, Sultan Hamengku Buwono IX termasuk figur yang pas. Peran ikhlasnya begitu krusial di zaman kemerdekaan di mana ia menyediakan diri dan kesultanannya

³⁹ Sjafruddin Prawiranegara, 'Bung Hatta Demokrat Sejati', in *Agama Dan Bangsa. Kumpulan Karangan Terpilih. Jilid 3*, ed. by Ajip Rosidi (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011), 360-361.

⁴⁰ Sjafruddin Prawiranegara, 'Bung Hatta Demokrat Sejati Dan Pemimpin Yang Saya Hormati', in *Bung Hatta: Mengabdikan Kepada Cita-Cita Perjuangan* (Jakarta: Panitia Peringatan Mohammad Hatta 70 Tahun, 1972).



untuk kepentingan Republik Indonesia. Pangkat feodalnya tidak memengaruhi rasa kemanusiaan dan kerakyatannya. Sosok demikian, lanjut pak Sjaf, benar-benar manifestasi bangsawan seperti yang tersurat dalam pepatah Perancis *noblesse oblige*, yakni seorang yang memahami dan melaksanakan kewajiban melindungi dan membantu siapa pun baik rakyatnya sendiri maupun orang lain selama membutuhkan.⁴¹

Diplomat. Bagi Sjafruddin, diplomat yang baik ialah yang mampu mensikapi berbagai kekurangan menjadi kelebihan dari yang bersifat jelek menjadi cantik. Namun hal ini dilakukan bukan dalam arti menutup-nutupi kekurangan dan memutarbalikkan kebenaran melainkan pandai memberikan pengertian sehingga mampu bersikap otokritis terhadap kekurangan dan kesalahan sendiri. Karakter ini melekat pada diri Roem. Roem memiliki relasi orang Belanda yang cukup banyak meskipun dengan kekejaman Nica, ia ditembak dan pincang hingga akhir hayatnya. Dalam konteks politik, jika proklamasi kemerdekaan (17 Agustus 1945) baru merupakan kemerdekaan negara, maka persetujuan Roem-Royen mengantarkan pada kemerdekaan rakyat dan bangsa dalam konteks pengakuan oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Dengan sikap sabar dan berbudi tinggi, Mr. Roem mengukuhkan diri sebagai salah satu pahlawan perdamaian⁴².

Homo Islamicus. Mantan Gubernur BI ini menguraikan kriteria seorang muslim sejati, yakni : (a) mudah untuk memahami dan menjalankan ajaran-ajaran Islam, (b) berdasarkan keyakinan yang mendalam berusaha berkontribusi secara nyata baik dalam pribadi

⁴¹ Sjafruddin Prawiranegara, 'Seorang Patriot Teladan', in *Tahta Untuk Rakyat, Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX* (Jakarta: Gramedia, 1982).

⁴² Sjafruddin Prawiranegara, 'Roem, Manusia Dan Kawan Ideal', in *Mohammad Roem 70 Tahun: Pejuang Perunding* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).



maupun dalam perjuangan sosial dan politik, (c) memandang bahwa Islam itu merupakan sumber kekuatan yang hidup dan tidak ada batasnya. Lanjutnya, sifat ini tercermin salah satunya pada pribadi Natsir. Ia menyanjung koleganya di Masjumi tersebut sebagai Muslim Sejati (*homo Islamicus*). Hal ini tak mengherankan karena sejak kecil ia sudah menjadi santri, setelah dewasa berfungsi sebagai kyai. Namun, tak lupa, ia juga mengkritik konstruksi argumen apologetik pencetus Mosi Integral ini saat berdiskusi baik dengan sesama muslim maupun saat bersua dengan non muslim. Selanjutnya, posisi 'Kyai Natsir' sebagai mercusuar Islam sejajar dengan kiprah Kyai Hasjim Asy'ari dan Kyai Achmad Dahlan. Mereka merupakan sosok yang mengenal dunia tetapi dapat melepaskan diri dari berbagai godaannya.⁴³

Muttaqin. Sjafruddin berpendapat bahwa manusia takwa yang terdiri dari elemen akhlak yang baik, keramahan, kesederhanaan, keunggulannya, kedermawanan. Sosok ini misalnya terdapat pada Raden Haji Oene Djoenaidi, "Si Raja Sereh" dari Manonjaya, Tasikmalaya. Kontribusinya pada penerbitan harian *Pemandangan*,⁴⁴ di masa pergerakan zaman Belanda sebelum Perang Dunia II begitu krusial. Koran ini bernilai istimewa sebagai media pendidikan politik dan sosial guna pematangan rakyat Indonesia ke arah kemerdekaan. Karenanya, Mang

⁴³ Sjafruddin Prawiranegara, 'Muhammad Natsir Muslim Sejati', in *Muhammad Natsir 70 Tahun: Kenang-Kenangan Kehidupan Dan Perjuangan* (Jakarta: Pustaka Antara, 1978).

⁴⁴ Harian ini awalnya surat kabar mingguan. Pertama kali terbit di Jakarta pada 8 April 1933 di bawah pimpinan Saeroen bekerjasama dengan Raden Hadji Oene Djoenaidi, pengusaha asal Tasikmalaya Jawa Barat. Lihat Abdul Hamid, 'R.H.O Djoenaidi: Si Raja Sirih Pejuang Pers', *September 09*, 2019 <<https://situmang.com/2019/09/09/r-h-o-djoenaidi-si-raja-sirih-pejuang-pers/>> [accessed 28 June 2020].



Hadji Djoenaidi, sapaan akrabnya, tetap memberikan support terhadap penerbitan koran ini kendati tak mendapatkan keuntungan material.

Ambisius. Sosok ini di mata Sjafruddin memiliki beberapa ciri seperti: (a) terkadang memandang kebenaran dan keadilan itu sesuatu yang relatif, (b) hasrat menjadi penguasa utama serta berupaya mempertahankan kedudukan itu, (c) seringkali sampai harus mengorbankan teman dekatnya sekalipun. Dengan nada subyektif, dalam beberapa tulisannya, Sjafruddin mengarahkan kriteria ini pada satu sosok: Soekarno.

Keunggulan Bung Karno terletak pada gaya orator dan kepandaian beretorika. Banyak yang tidak dimengerti apa itu 'Manipol Usdek'. Akan tetapi, ketika disampaikan dengan bumbu slogan-slogan dan istilah-istilah yang bombastis, banyak yang terhipnotis mendengarnya. Pun ketika Soekarno menghidangkan isi hati dan pikirannya saat sedang menyerang dan mengejek lawan-lawannya mampu membuat audiens yang fanatik mengagung-agungkannya sebagai 'Pemimpin Besar Revolusi'.⁴⁵ Sikap kooperatifnya pada era Jepang, dinilai sebagai sebuah sikap 'menjilat' dan turut menindas bangsa sendiri. Hal ini terutama dalam usaha pengerahan romusha untuk keperluan perang Jepang. Perilaku ini merupakan sikap yang 'menjual bangsa'.⁴⁶

Ada pun terkait rela mengorbankan kawan sendiri, asumsi ini sepiantas terlihat subyektif sehubungan mantan perdana menteri PRRI ini pernah menjadi tahanan politik pada era Demokrasi Terpimpin Soekarno mulai bulan Maret 1962 - Juli 1966. Saat itu, ia ditempatkan dalam

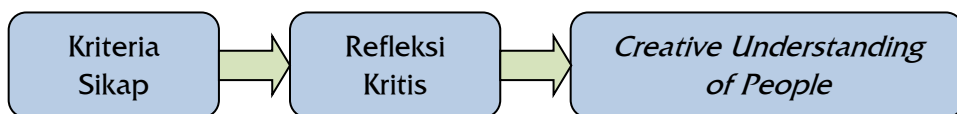
⁴⁵ Prawiranegara, *Agama Dan Bangsa. Kumpul. Karang. Terpilih. Jilid 3*, 392-393.

⁴⁶ Prawiranegara, 'Bung Sjahrir Pendekar Kemerdekaan Dan Pendekar Demokrasi'.



tahanan di sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jakarta. Akan tetapi, tekanan politik ternyata berlaku juga terhadap Hatta dan Sjahrir, dua sahabat karib Soekarno. Setelah peristiwa PRRI tahun 1958, relasi Sjahrir dan [Soekarno](#) meregang hingga dibubarkannya PSI tahun 1960. Tahun 1962 hingga 1965, tanpa peradilan, Sjahrir ditangkap dan dipenjarakan sampai terkena *stroke*. Ia diizinkan berobat ke [Zürich Swiss](#), hingga akhirnya meninggal di Swiss pada tanggal [9 April 1966](#) sebagai tawanan politik. Hatta mendeskripsikan epilog dramatis perjalanan Sjahrir yang dikatakannya lebih banyak menderita dalam Republik Indonesia sendiri yang berdasarkan Pancasila daripada dalam Hindia Belanda, kolonial yang ditentangnya.⁴⁷ Ironisnya, ungkapan Hatta terjadi juga pada dirinya. Pada tahun 1960-an Bung Hatta menulis “Demokrasi Kita” yang isinya berupa kritik terhadap rezim Soekarno. Selain melarang dan membreidel tulisan yang dimuat dalam harian Panji Masyarakat pimpinan Hamka, Bung Hatta pun mendapat tekanan politik.⁴⁸

Dengan demikian, dapat dijelaskan bagaimana proses pemahaman atas orang yang dilakukan Sjafruddin seperti terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 1.

Proses *Creative Understanding of People*

⁴⁷ Lukman Hakiem, 'Orde Lama, Syahrir, Natsir, Hamka:Penjara Tanpa Proses Hukum', *Januari 19*, 2019 <<https://republika.co.id/berita/plk6zr385/Orde-lama-syahrir-natsir-hamkapijara-tanpa-proses-hukum>> [accessed 28 June 2020].

⁴⁸ Ivana, 'Panji Masyarakat Dan Terbitnya "Demokrasi Kita"', *Januari 06*, 2020 <<http://pedomanbengkulu.com/2020/01/panji-masyarakat-dan-terbitnya-demokrasi-kita/>> [accessed 28 June 2020].



Clarification of Values

Nilai dan ideologi yang dianut oleh seorang tokoh dapat dilihat dari peta pemikirannya selama ia berkiprah dan terus berdialektika dengan realitas. Hal ini terjadi pula pada Sjafruddin. Ketika memaparkan sebuah pemikiran, seringkali Sjafruddin menjelaskan adanya perbedaan ideologi atau filsafat dalam sebuah fenomena politik, maupun sosial. Selanjutnya, ia pun mencoba menunjukkan kecenderungan pandangan ideologisnya sebagai upaya mempertegas, menegasi atau memediasi di antara pertentangan dua nilai tersebut. Dengan demikian ia mencoba mengklarifikasi berbagai nilai (*clarification of values*) tersebut sesuai keyakinan ideologis yang dianutnya. Sjafruddin sampai pada konklusi sikap yang obyektif terhadap perbedaan nilai. Di antaranya :

Upaya Moderasi. Pada saat awal kemerdekaan, terdapat dua pemikiran kenegaraan yang berkembang. Keduanya direpresentasikan oleh dua kekuatan ideologis yang menguat pada awal konstruksi pemikiran dan praksis politik di Indonesia, yakni Soekarno dan Natsir. Perbedaannya seperti terlihat seperti berikut.

Tabel 2.

Agama dan Negara di Mata Soekarno dan M. Natsir

Tokoh	Distingsi Pemikiran
Soekarno	<ul style="list-style-type: none">▪ beranggapan Islam yang dihadapinya saat itu merupakan Islam yang mandeg dalam berpikir, penuh tahayul maka dari itu dibutuhkan penafsiran ulang menyeluruh.▪ mendukung netralitas negara dalam agama. Baginya yang terpenting negara menghormati keyakinan tiap penduduknya.▪ khawatir jika Islam digunakan untuk membenarkan



tindakan penguasa apabila diformalisasi sebagai dasar negara.

- M. Natsir
- meyakini bahwa negara tidak dapat dan tidak boleh netral. Antara Islam dan kehidupan formal bernegara justru saling berkaitan.
 - Cemas jika sendi-sendi kehidupan bernegara steril dari agama, dikuatirkan masyarakat akan jauh dari norma kemanusiaan karena negara dengan alasan kesterilan itu justru absen saat warga butuh kepastian tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama.
-

Sumber : Suhelmi (2002)⁴⁹

Konsekuensi dengan nilai-nilai demokrasi yang dianutnya, pada tahun 50-an, ia menulis surat kepada Soekarno atas nama kedudukannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Salah satu pesan surat itu adalah mengingatkan tugas kepala negara dalam sebuah negara demokrasi. Ia mengkritik perjalanan dinas keluar negeri Soekarno di tengah persoalan politik dalam negeri yang semakin hari semakin panas. Menurutnya,

“Dalam sebuah negara demokrasi misalnya, adalah mustahil bahwa seorang Kepala Negara dapat meninggalkan negaranya, meskipun di bawah selimut perjalanan ‘tetirah’ pada saat-saat kesukaran-kesukaran negara menyapu puncaknya sebagai akibat politik yang dipaksakan oleh Paduka Yang Mulia kepada rakyat Indonesia. Umum mendapat kesan yang kuat bahwa kesehatan Paduka Yang Mulia adalah jauh lebih baik daripada kesehatan Pemangku Presiden yang hanya dapat berdiri di atas kakinya berkat berbagai suntikan dan perawatan istimewa dari para dokter”.

⁴⁹ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam* (Jakarta: Teraju, 2002), 16.



Surat tersebut termasuk korespondensi terakhir atas kedudukannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Setelah itu, tanpa disengaja, dirinya terlibat dalam konflik pimpinan militer daerah dan pusat yang memuncak dengan berdirinya PRRI. Namun, dalam surat tersebut ditegaskan nilai yang seharusnya dijalankan oleh seorang Presiden di tengah kemelut politik dalam negeri yang sedang memanas. Seorang presiden tidaklah ksatria saat berani meninggalkan medan yang tengah menghangat tersebut.⁵⁰

Sjafruddin membedakan dengan tegas ideologi dan agama. Baginya, Pancasila itu bukan sebuah agama, melainkan sebuah filsafat atau suatu teori. Karenanya sulit diharapkan dari teori itu dapat menimbulkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Justru karena keimanan dan pemahaman terhadap Islam, seorang Muslim dapat menerima Pancasila.⁵¹ Lantas, ia pun tak setuju dengan ide untuk menjadikan Pancasila sebagai asaas tunggal dalam partai politik dan organisasi sosial, politik dan masyarakat. karena hal itu, meski tidak tersurat, secara implisit berusaha menggantikan perspektif agama dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat.

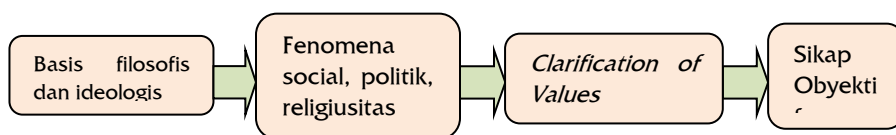
Dalam hal ini, ia memandang Islam sebagai sebuah sistem nilai liberatif dan humanis dan mengedepankan civil society.⁵² Karenanya ia berbeda dengan Natsir. Menurutny, Natsir dididik dalam lingkungan yang menganggap musuh pihak Belanda, bukan karena kolonialismenya

⁵⁰ Sjafruddin Prawiranegara, 'Surat Gubernur Bank Indonesia Kepada Soekarno', in *Mr. Sjafruddin Prawiranegara: Pemimpin Bangsa Dalam Pusaran Sejarah* (Jakarta: Republika, 2011), 536.

⁵¹ Prawiranegara, *Agama Dan Bangsa. Kumpul. Karang. Terpilih. Jilid 3, 134.*

⁵² Hasan Mustapa, 'Political Regional Tourism in Civil Society Perspective (Profile of Development Strategy of Situ Bagendit Tourism Object, Banyuresmi District, Garut Regency, West Java Province)', *Politicon*, 1.1 (2019), 24–50.

melainkan lebih kepada agamanya. Sayangnya, hal ini diperparah dengan anggapan bahwa agama lain terutama Kristen itu mengandung unsur penindasan. Pak Sjaf tidak ingin terjebak dengan pemahaman yang sempit itu. Baginya, umat Islam harus membuka diri sehingga bisa mengusung toleransi beragama dan memungsikan Islam sebagai kekuatan moral untuk memperbaiki keadaan dunia.⁵³ Dengan demikian setelah melalui proses klarifikasi berbagai nilai, mantan ketua PDRI ini sampai pada konklusi sikap obyektif sehingga dapat mengakui dinamika perbedaan penilaian terhadap fenomena keberagamaan, sosial maupun politik. Adapun prosesnya seperti terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 2.

Proses Klarifikasi Berbagai Nilai Menghasilkan Sikap Obyektif

Dari skema di atas, terlihat bahwa tokoh Masjumi ini melihat pertama kali dari aspek ideologis filosofis terkait fenomena sosial, politik atau sebuah sikap keagamaan. Dari situ, bisa diambil nilai-nilai dasar yang dimiliki setiap fenomena tersebut. Setelah melalui proses klarifikasi, baru dapat dinilai dengan sebuah sikap yang obyektif.

⁵³ *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an Sampai 1990-an*, ed. by Thee Kian Wie, 1st edn (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), 50.



Aesthetic Appeal

Beberapa tokoh memberikan tanggapannya terhadap sosok tokoh Masjumi ini. Kahin, misalnya, menggambarkan kebesaran Sjafruddin sebagai sosok yang jujur, tegas dalam bersikap, memiliki semangat nasionalisme yang menyala, serta integritas yang tinggi.⁵⁴ Demikian pula Alatas, ketika membandingkan Soekarno, Tan Malaka, Sjahrir dan Sjafruddin. Ia mengakui posisi Soekarno, Tan Malaka dan Sjahrir sebagai intelektual yang berpikiran modern. Tapi, ia lebih mengakui kedudukan Sjafruddin sebagai Muslim Ideal, yang tulus dan yakin dalam beragama serta berjuang memimpin umat dalam melalui nuansa demokrasi di tengah pluralitas.⁵⁵

Berbagai kajian mencoba membaca corak pemikiran Sjafruddin baik dari segi respons terhadap demokrasi, perspektif keadilan sosial. Mereka umumnya berpendapat bahwa orientasi pak Sjafruddin termasuk dalam *revivalis*,⁵⁶ *liberal-modernis*,⁵⁷ *substantif*,⁵⁸ *liberal-kritis*,⁵⁹ *integratif*.⁶⁰ Sementara itu, dalam makalah ini, penulis melihat kategorisasi Sjafruddin dalam dua hal yakni pemikiran. Dalam hal pemikiran tokoh Masjumi ini termasuk dalam kategori 'progresif modernis'. Sementara dalam level keagamaan cenderung 'revivalis.' Lebih jelas dapat dilihat gambar berikut.

⁵⁴ George McTurnan Kahin, 'In Memoriam Sjafruddin Prawiranegara 1911-1989', *Indonesia*, 48 (October), 1989, 101-5.

⁵⁵ Syed Hussein Alatas, *Kita Dengan Islam: Tumbuh Tiada Berbuah* (Singapore: Pustaka Nasional, 1979).

⁵⁶ Masykuri Abdillah, *Islam Dan Demokrasi: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, 1st edn (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 18.

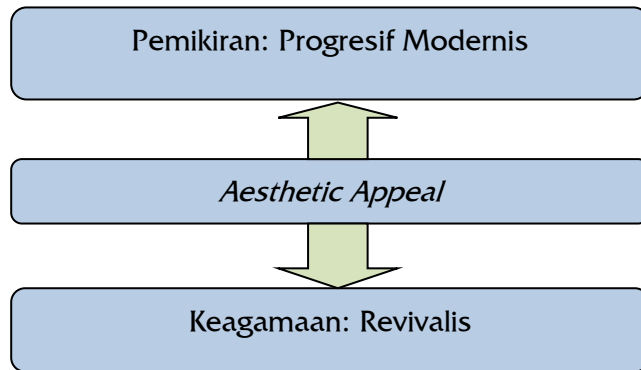
⁵⁷ Pipip A. R. Hasan, 'Islam, Social Justice and Economic Development: A Study of the Works of Sjafruddin Prawiranegara' (Concordia University, 2012), 343.

⁵⁸ Rahardjo, 204.

⁵⁹ Rahardjo, 209.

⁶⁰ Koentowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, ed. by A. E. Priyono (Bandung: Mizan, 1999), 321.





Gambar 3.
Tipologi Pemikiran dan Keagamaan Sjafruddin

Modernisme dalam konteks pemikiran keagamaan Islam merupakan sebuah upaya reinterpretasi kontekstual ajaran Islam secara rasional sehingga *compatible* dengan pergerakan zaman. Kaum modernis sering memandang Islam dalam konteks upaya moderasi (mengambil jalan tengah ; *ummatan wasaʿan*) di antara berbagai kecenderungan ekstrim yang terdapat dalam agama-agama dan paham lain.⁶¹ Revivalisme merujuk pada upaya pembaharuan mengaktualisasikan kemurnian Islam sebagaimana termanifestasi dalam kehidupan di masa Nabi Muhammad SAW dan kaum Salaf di mana manifestasi bentuk radikalnya adalah fundamentalisme. Kaum fundamentalis dalam makna terbatas ialah kelompok yang melakukan pendekatan konservatif dalam melakukan

⁶¹ Ahmad Hasan, 226-227; Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), 585-586.



reformasi keagamaan, bercorak literalis serta penekanan pada pemurnian doktrin.⁶²

Community Agreement

Dalam kajian akademis, para pemerhati umumnya sepakat (*community agreement*) bahwa proporsi Sjafruddin sebagai ekonom lebih besar dari peran sebagai politisi atau mubaligh.

Perintis Ekonomi Nasional. Nasution memandang Mr. Sjaf sebagai peletak dasar fondasi kemandirian Bank Indonesia. Selain itu, peran sentralnya dalam sejarah ekonomi dan keuangan ialah pada saat penerbitan mata uang Indonesia yang pertama setelah kemerdekaan yaitu *Oeang Republik Indonesia* (ORI) pada 30 Oktober 1946 dan pemberlakuan kebijakan moneter 'Gunting Sjafruddin' pada tanggal 10 Maret 1950.⁶³

Hal tersebut bisa dimaklumi karena karir birokrasi pertamanya adalah seorang petugas pajak di Kediri, Jawa Timur hingga ke Bandung (1940-1945). Kiprah dalam praksis keuangan juga diembannya saat ia menjadi Menteri Muda Keuangan pada kabinet Sjahrir II (Maret-Oktober 1946), Menteri Keuangan pada Kabinet Sjahrir III (Oktober 1946-juni 1947) hingga menjadi Presiden De Javasche Bank (Juli 1951-Juli 1953) dan terakhir menjadi Gubernur Bank Indonesia (Juli 1953-Januari 1958). Dalam kiprahnya tersebut, Sjafruddin banyak menelurkan buah pemikirannya tentang keuangan dan ekonomi.

⁶² Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama Dan Negara, Merajut Kerukunan Antarumat*, 1st edn (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), 182; Allan R. Taylor, *The Islamic Question in Middle East Politics* (London: Westview, 1998), viii.

⁶³ Darmin Nasution, 'Peletak Fondasi Kemandirian Bank Indonesia', in *Mr. Sjafruddin Prawiranegara Pemimpin Bangsa Dalam Pusaran Sejarah* (Jakarta: Republika, 2011), 270.



Sementara itu, pemikiran politik Sjafruddin meskipun ada jarang menjadi perhatian karena perhatian para pengkaji ketika melihat fenomena politik para pemikir Masjumi mereka lebih terpesona dengan pemikiran M. Natsir atau Mr. Mohammad Roem.⁶⁴ Demikian juga Deliar Noer serta Yusril Ihza Mahendra, meski mengakui sedikit pemikiran politik Sjafruddin tapi tidak cukup untuk menganalisis lebih jauh pemikiran mantan pimpinan PDRI ini.

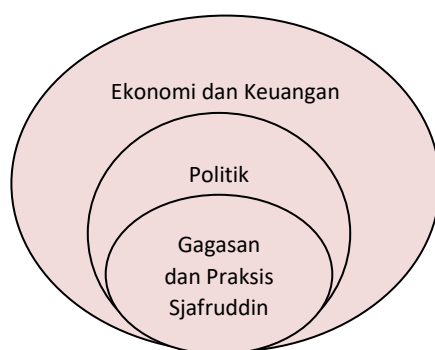
Dibanding pemikirannya, peran politik Sjafruddin memang lebih termanifestasi secara *clear and distinct*. Posisinya sebagai ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (Desember 1948-Juli 1949) memperjelas posisi ini. Namun, perannya sebagai Perdana Menteri Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang diklaim sebagai sebuah pemberontakan oleh rezim Soekarno seakan mereduksi peran historis tersebut. Ujungnya, pengakuan peran politik sebagai pahlawan memerlukan usaha yang keras hingga akhirnya terealisasi dengan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 8 November 2011. Sementara itu, PDRI sebagai sebuah gerakan yang mampu menyelamatkan eksistensi Republik Indonesia mendapat apresiasi dari pemerintah melalui Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa tanggal 19 Desember, mengacu pada kelahiran PDRI tanggal 19 Desember 1948, sebagai Hari Bela Negara.

Apresiasi atas peran Sjafruddin dalam berjalan dinamis. muncul wacana untuk lebih menegaskan peran Sjafruddin baik sebagai presiden

⁶⁴ Agus Edi Santoso (ed.), *Tidak Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Nurcholish Madjid – Mohamad Roem* (Jakarta: Djambatan, 1997).



kedua,⁶⁵ atau sebagai bapak otonomi.⁶⁶ Secara yuridis, menurut Jimly Ashidiqy, selama Soekarno dan Hatta berada dalam tahanan, Presiden RI yang disebut dengan istilah Ketua PDRI dipegang oleh Sjafruddin Prawiranegara yang baru diserahkan kembali kepada Soekarno selaku Presiden pada tanggal 13 Juli 1948.⁶⁷ Gelar Bapak Otonomi patut dipertimbangkan sehubungan dengan perannya menyangkut sentralisasi keuangan pada saat ia berposisi sebagai pengatur keuangan negara pada dasawarsa pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, kebijakan Sjafruddin, ditengarai menimbulkan benturan-benturan kebijakan dengan Presiden yang meski tidak sependapat pada akhirnya bisa menerimanya.



Gambar 4.

Dimensi Pemikiran dan Praksis Ekonomi dan Politik Sjafruddin

⁶⁵ Akmal Nasery Basral, *Presiden Prawiranegara, Kisah 207 Hari Sjafruddin Prawiranegara Memimpin Indonesia*, 1st edn (Bandung: Mizan, 2011).

⁶⁶ Ferry Raymond Mawikere, 'Dari Manado: Sedikit Kisah Tentang Minahasa, Otonomi Daerah, Dan Sjafruddin Prawiranegara', in *Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Pemimpin Bangsa Dalam Pusaran Sejarah*, ed. by Lukman Hakiem, 1st edn (Jakarta: Republika, 2011), 177.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, 'Presiden Sjafruddin Prawiranegara', in *Mr. Sjafruddin Prawiranegara Pemimpin Bangsa Dalam Pusaran Sejarah*, ed. by Lukman Hakiem, 1st edn (Jakarta: Republika, 2011), 499.

Reform of Society

Salah satu buah renungan Sjafruddin ialah harapannya akan sebuah tatanan ideal yang tidak bersifat utopia seperti digagas para sosialis utopian. Bagi Sjafruddin, arah jalan sejarah akan selalu berupaya menuju alur kesempurnaan. Setiap gagasan yang tengah dipikirkan akan dihadapkan dengan realitas yang menuntut perbaikan. Ia mengilustrasikan betapa perubahan revolusioner telah terjadi di berbagai belahan di dunia ini. sejumlah negara komunis di Eropa Timur, misalnya, telah melunakkan komunisme menjadi lebih human dan liberal. Intelektual Muslim asal Banten ini juga menyatakan bahwa usaha Mao Tse Tung untuk mengadakan perlawanan mati-matian terhadap arus perubahan revisionisme dalam jalannya revolusi, adalah hal yang sia-sia. Pun demikian dengan usaha Soekarno yang terus berupaya untuk menjaga nafas revolusi, tak dapat dipertahankan. Sjafruddin melanjutkan, “Sudah tiba waktunya kita kembali sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang harus hidup sebagai saudara dengan saudara dan hak-hak juga kewajiban-kewajiban sebagai saudara. Evolusi ke arah satu dunia dan satu umat tidak dapat dihalang-halangi”.⁶⁸

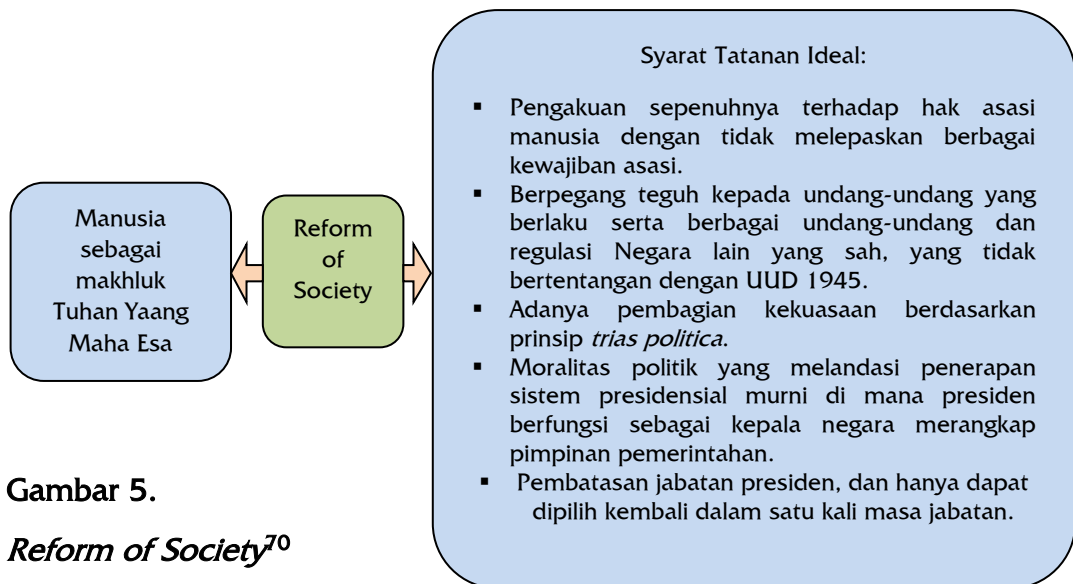
Pemikiran tentang tatanan ideal berawal dari diskusi terkait manakah yang lebih baik apakah Orde Lama atau Orde Baru. Bagi Sjafruddin, kedua orde tersebut diisi oleh manusia yang sama, yakni bangsa Indonesia. Salah satu ukuran untuk menilai kebaikan sebuah orde ialah dari jaminan yang diberikan tatanan tersebut terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Untuk itu, sangat penting bagi terciptanya sebuah orde yang memberikan

⁶⁸ Sjafruddin Prawiranegara, ‘Peranan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Politik Dan Ekonomi’, in *Agama Dan Bangsa. Kumpulan Karangan Terpilih. Jilid 3*, 1st edn (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011), 131.



keleluasaan, ketenangan dan ketentraman serta kebebasan dari rasa tertekan kepada seluruh bagian bangsa, tak peduli apapun namanya, baru atau lama. Bangsa ini, menurutnya, perlu menemukan kembali natural order, orde alamiah atau orde asli, yang otentisitasnya tidak berdasarkan perspektif manusia sebagai penguasa melainkan menurut kehendak Tuhan, yang menciptakan bumi dan langit serta segala isinya. Di bawah natural order ini, seluruh elemen bangsa ini dapat mencapai kembali persatuannya dalam suasana perdamaian nasional yang timbul dari kesadaran bahwa mereka bersamaan keturunan, bersaudara. Bahkan persaudaraan mereka itu hidup bukan terbatas pada bangsa Indonesia semata, melainkan juga meliputi seluruh umat manusia.⁶⁹

Adapun beberapa prinsip yang harus ada dalam sebuah tatanan ideal atau orde natural ini ialah sebagai berikut.



Gambar 5.

Reform of Society⁷⁰

⁶⁹ Prawiranegara, 'Peranan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Politik Dan Ekonomi' 115.

⁷⁰ Prawiranegara, *Agama Dan Bangsa. Kumpul. Karang. Terpilih. Jilid 3, 132-133.*

Gagasan Sjafruddin tentang pembatasan jabatan presiden akhirnya terealisasi dengan amandemen UUD setelah era reformasi. Indrayana menjelaskan bahwa setidaknya terdapat empat konsep pembatasan: 1) Tidak ada masa jabatan kedua (*no re-election*); 2) Tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut (*no immediate re-election*); 3) Maksimal dua kali masa jabatan (*only one re-election*); 4) Tidak ada pembatasan masa jabatan (*no limitation re-election*). Filipina menerapkan konsep *no re-election* di mana pembatasan masa jabatan presiden hanya satu kali enam tahun. Setelah amandemen ke-22 konstitusi (1951) terkait pembatasan masa jabatan dua periode, Amerika Serikat mengimplementasikan sistem *only one re-election*. Sementara *no limitation re-election* pernah dialami Indonesia pada masa Soekarno (1945-1966) dan Soeharto (1966-1998).⁷¹ Ide tatanan ideal pada gilirannya selaras dengan upaya membangun good governance dengan berbagai derivasinya.⁷²

KESIMPULAN

Pengalaman politik yang tidak *happy ending*, membuat Sjafruddin lebih matang dalam memahami persoalan politik, ekonomi, social dan budaya. Berdasarkan telaahan komunikasi politik Islam, terlihat bahwa komunikasi politik Islam yang dibawa Sjafruddin memiliki ciri khas: (a) Ia menjadikan Islam sebagai perspektif dasar untuk melihat seluruh dimensi kehidupan. Pada tahap inilah ia memberikan distingsi Pancasila sebagai

⁷¹ Denny Indrayana, 'Pembatasan Masa Jabatan Presiden', *January 21*, 2014 <<https://nasional.sindonews.com/berita/828497/18/pembatasan-masa-jabatan-presiden>> [accessed 28 June 2020].

⁷² Hasan Mustapa and others, 'Good Governance and Corruption in the View of Syafruddin Prawiranegara (1911-1989)', 24.04 (2020), 5336-50 <<https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201631>>.



ideology dan Islam sebagai agama. Baginya agama Islam harusnya yang menjiwai Pancasila; (b) Kebesaran seorang tokoh tidak dilihat dari sejauhmana popularitas politik yang didapatkan tapi sedalam apa akhlak kenegarawanan mengejewantah dalam kesatuan pikiran, emosi dan tindakan. Dengan pendekatan ini, ia bisa menguak jasa seorang Mang Hadji Djoenaedi sebagai tokoh pers yang nyaris luput dari perhatian sejarah; (c) Gagasan yang disampaikannya mengandung epistemology rasional ketimbang emosional. Sehingga lebih besar proporsi obyektifitas dari subyektifitas. Ini terlihat dari kemampuannya dengan cermat menguliti berbagai kelemahan epistemology apologetic pada pemikiran Natsir atau epistemology sekuler pada Sjahrir; (d) Pikirannya jauh memandang ke depan melampaui zamannya. Ini terlihat dengan ide pembatasan jabatan presiden, sesuatu yang terlihat utopis di era begitu kentalnya kekuatan Orde Baru namun ternyata dapat terealisasi di masa Reformasi. Pada titik ini ia sudah selevel dengan pemikiran muslim progresif universal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, *Islam Dan Demokrasi: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, 1st edn (Jakarta: Prenamedia Group, 2015)
- Ahsan, Ivan Aulia, 'Maklumat 3 November & Perbedaan Sukarno-Sjahrir Soal Partai Politik', *November 03*, 2019 <<https://tirto.id/maklumat-3-november-perbedaan-sukarno-sjahrir-soal-partai-politik-cy7X>> [accessed 27 June 2020]
- Al-Kinaniy, Ibn Jama'ah, *Tazkirah Al-Sāmi' Wa Al-Mutakallim Fi Adab Al-Ālim Wa Al-Muta'Alim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)
- Alatas, Syed Hussein, *Kita Dengan Islam: Tumbuh Tiada Berbuah* (Singapore: Pustaka Nasional, 1979)
- Almond, Gabriel, and Bingham Powell, *Comparative Politics a Developmental Approach* (Boston: Little Brown, 1966)
- Anderson, B. R. O'G, *Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation: 1944-1945* (New York: Interim Report Series, Cornell University Press, 1961)
- Asshiddiqie, Jimly, 'Presiden Sjafruddin Prawiranegara', in *Mr. Sjafruddin Prawiranegara Pemimpin Bangsa Dalam Pusaran Sejarah*, ed. by Lukman Hakiem, 1st edn (Jakarta: Republika, 2011)
- Azra, Azyumardi, *Reposisi Hubungan Agama Dan Negara, Merajut Kerukunan Antarumat*, 1st edn (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002)
- Basral, Akmal Nasery, *Presiden Prawiranegara, Kisah 207 Hari Sjafruddin*



- Prawiranegara Memimpin Indonesia*, 1st edn (Bandung: Mizan, 2011)
- Chafee, S, ed., *Political Communication: Issues and Strategies for Research* (Beverly Hills: SAGE, 1975)
- Drozdikova, Jarmila, 'Review Articles "Progressive Muslims"', *Asian and African Studies*, 14.1 (2005), 83–95
- Effendy, Bahtiar, 'Pentingnya Mengaitkan Etika Dan Moralitas Dengan Politik', in *Jalan Tengah Politik Islam. Kaitan Islam, Demokrasi, Dan Negara Yang Tidak Mudah* (Jakarta: Ushul Press, 2005)
- Foucault, Michael, *Power Knowledge: Selected Interviews and Others Writings 1972-1977* (New York: Pantheon Books, 1980)
- Gazali, Effendi, 'Interaksi Politik Dan Media : Dari Komunikasi Politik Ke Politik Komunikasi', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8 (2004), 53–74
- Hakiem, Lukman, 'Orde Lama, Syahrir, Natsir, Hamka:Penjara Tanpa Proses Hukum', *Januari* 19, 2019 <<https://republika.co.id/berita/plk6zr385/Orde-lama-syahrir-natsir-hamkapijara-tanpa-proses-hukum>> [accessed 28 June 2020]
- Hamid, Abdul, 'R.H.O Djoenaidi: Si Raja Sirih Pejuang Pers', *September* 09, 2019 <<https://situmang.com/2019/09/09/r-h-o-djoenaidi-si-raja-sirih-pejuang-pers/>> [accessed 28 June 2020]
- Hasan, Ahmad, *The Doctrine of Ijma' in Islam* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1976)
- Hasan, Pipip A. R., 'Islam, Social Justice and Economic Development: A Study of the Works of Sjafruddin Prawiranegara' (Concordia



- University, 2012)
- Hovland, C. I., I. L. Janis, and H. H. Kelley, *Communication and Persuasion* (New Heaven, Conn: Yale University Press, 1953)
- Indrayana, Denny, 'Pembatasan Masa Jabatan Presiden', *January 21*, 2014 <<https://nasional.sindonews.com/berita/828497/18/pembatasan-masa-jabatan-presiden>> [accessed 28 June 2020]
- Ivana, 'Panji Masyarakat Dan Terbitnya "Demokrasi Kita"', *January 06*, 2020 <<http://pedomanbengkulu.com/2020/01/panji-masyarakat-dan-terbitnya-demokrasi-kita/>> [accessed 28 June 2020]
- Kahin, George McTurnan, 'In Memoriam Sjafruddin Prawiranegara 1911-1989', *Indonesia*, 48 (October), 1989, 101-5
- , *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1952)
- Kamaruddin, *Modul Komunikasi Politik* (Lhokseumawe: Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh, 2015)
- Koentowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, ed. by A. E. Priyono (Bandung: Mizan, 1999)
- Krech, David, *Individual in Society* (California: McGraw Hill, 1962)
- Laswell, Harold D., *Politics: Who Gets What, When How?* (New York: Whittlesey House, 1936)
- Madinier, Rémi, *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi Dan Islam Integral*, 1st edn (Jakarta: Penerbit Mizan, 2013)
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin Dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992)



- Mawikere, Ferry Raymond, 'Dari Manado: Sedikit Kisah Tentang Minahasa, Otonomi Daerah, Dan Sjafruddin Prawiranegara', in *Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Pemimpin Bangsa Dalam Pusaran Sejarah*, ed. by Lukman Hakiem, 1st edn (Jakarta: Republika, 2011)
- Miller, Katherine, *Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts*, 2nd edn (New York: McGraw-Hill, 2005)
- Al Mujib, Ihwan Huda, 'Perspektif Islam Dalam Komunikasi Politik Kyai (Studi Etnografi Pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah Jember Jawa Timur)', *Jurnal Nomosleca*, 6.1 (April) (2020)
- Mustapa, Hasan, 'Political Regional Tourism in Civil Society Perspective (Profile of Development Strategy of Situ Bagendit Tourism Object, Banyuwangi District, Garut Regency, West Java Province)', *Politicon*, 1.1 (2019), 24–50
- Mustapa, Hasan, Andi Faisal Bakti, Faruq Ansori, Udin Saripudin, and Yusep Budiansyah, 'Good Governance and Corruption in the View of Syafruddin Prawiranegara (1911-1989)', 24.04 (2020), 5336–50 <<https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201631>>
- Nasution, Darmin, 'Peletak Fondasi Kemandirian Bank Indonesia', in *Mr. Sjafruddin Prawiranegara Pemimpin Bangsa Dalam Pusaran Sejarah* (Jakarta: Republika, 2011)
- Petty, Richard E., and J. T. Cacioppo, *Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches* (Dubuque, IA: Wm. C. Brown, 1981)
- Prawiranegara, Sjafruddin, *Agama Dan Bangsa. Kumpulan Karangan Terpilih. Jilid 3*, ed. by Ajip Rosidi, 2011
- , 'Bung Hatta Demokrat Sejati', in *Agama Dan Bangsa. Kumpulan*



- Karangan Terpilih. Jilid 3*, ed. by Ajip Rosidi (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011)
- , 'Bung Hatta Demokrat Sejati Dan Pemimpin Yang Saya Hormati', in *Bung Hatta: Mengabdikan Kepada Cita-Cita Perjuangan* (Jakarta: Panitia Peringatan Mohammad Hatta 70 Tahun, 1972)
- , 'Bung Sjahrir Pendekar Kemerdekaan Dan Pendekar Demokrasi', in *Mengenang Sjahrir*, ed. by H. Rosihan Anwar (Jakarta: Gramedia, 1980)
- , *Ekonomi Dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam. Kumpulan Karangan Terpilih. Jilid 2*, ed. by Ajip Rosidi (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011)
- , *Islam Sebagai Pedoman Hidup. Kumpulan Karangan Terpilih. Jilid 1*, ed. by Ajip Rosidi (Jakarta: Idayu Press, 1986)
- , 'Muhammad Natsir Muslim Sejati', in *Muhammad Natsir 70 Tahun: Kenang-Kenangan Kehidupan Dan Perjuangan* (Jakarta: Pustaka Antara, 1978)
- , 'Peranan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Politik Dan Ekonomi', in *Agama Dan Bangsa. Kumpulan Karangan Terpilih. Jilid 3*, 1st edn (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011)
- , 'Roem, Manusia Dan Kawan Ideal', in *Mohammad Roem 70 Tahun: Pejuang Perunding* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- , 'Seorang Patriot Teladan', in *Tahta Untuk Rakyat, Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX* (Jakarta: Gramedia, 1982)
- , 'Surat Gubernur Bank Indonesia Kepada Soekarno', in *Mr.*



- Sjafruddin Prawiranegara: Pemimpin Bangsa Dalam Pusaran Sejarah* (Jakarta: Republika, 2011)
- Qutaybah, Ibnu, 'Al-Ma'arif', in *Dzakha'ir Al-'Arab*, ed. by Tsarwat 'Ukasyah (Dar al-al-Ma'arif, 1961)
- Rahardjo, M. Dawam, *Ekonomi Neo-Klasik Dan Sosialisme Religius. Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara* (Jakarta: Mizan Publika, 2011)
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, ed. by Tjun Surjaman, 9th edn (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)
- , *Retorika Modern Pendekatan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)
- Riberu, J., 'Manusia Etis Sjafruddin Prawiranegara', in *Mr. Sjafruddin Prawiranegara Pemimpin Bangsa Dalam Pusaran Sejarah*, 1st edn (Jakarta: Republika, 2011)
- Ryfe, D. M., 'History and Political Communication: An Introduction', *Political Communication*, 18.4 (2001), 407–20
- Safi, Omar, 'What Is Progressive Islam', *ISIM Newsletter*, 13.December (2003), 48–49
- Sahab, A., 'Politik Patron Client Di Sampang', *Jurnal Jejaring Administrasi Public*, 11.8 (2012), 1–7
- Schudson, Michael, 'The Sociology of News Production Revisited', in *Mass Media and Society*, ed. by James Curran and Michael Gurevitch (London: Edward Arnold, 1991)
- Severin, Warner J., and James W. Tankard, *Communication Theories:*



- Origins, Methods, Uses* (White Plains, N.Y.: Longman, 1988)
- Smith, E. C., *Pembredelan Pers Di Indonesia* (Jakarta: Grafiti Press, 1983)
- Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam* (Jakarta: Teraju, 2002)
- Surjomihardjo, A., *Beberapa Segi Perkembangan Pers Di Indonesia* (Jakarta: Information Development Research Project Information Department, 1980)
- Taylor, Allan R., *The Islamic Question in Middle East Politics* (London: Westview, 1998)
- Tobroni, Roni, 'Komunikasi Politik Mohammad Natsir', *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1.1 (2017), 39–60
<<https://doi.org/10.15575/cjik.v1i1.1208>>
- Tubbs, Stewart L., and Sylvia Moss, *Human Communication: An Interpersonal Perspective* (New York: Random House, 1974)
- Wie, Thee Kian, ed., *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an Sampai 1990-An*, 1st edn (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005)

